

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Timur Tengah merupakan wilayah yang sebagian besar terdiri atas negara-negara Arab. Akan tetapi, ada juga beberapa negara di Timur Tengah yang merupakan negara non-Arab seperti Turki dan Israel. Meskipun bukan negara non-Arab, Turki dan Israel merupakan negara yang memiliki peranan dalam konflik di Timur Tengah. Karena seperti yang diketahui, Timur Tengah merupakan wilayah yang sering mengalami konflik. Sebagai contoh, pada tahun 2003 pemerintah Turki berperan sebagai mediator dalam konflik internal Syiah dan Sunni di Iraq. Mediasi ini membantu terbentuknya pemerintahan yang cukup majemuk di negara itu. Sementara Israel, adalah negara yang saat ini menjadi sorotan utama dalam konflik berkepanjangan dengan Palestina.¹

Apabila membahas Turki dan Israel, kedua negara tersebut ternyata memiliki hubungan diplomatik yang baik. Turki juga merupakan negara mayoritas Muslim yang menyatakan kedaulatan Israel pada sekitar Maret 1949.

¹“Turki, bintang terang baru dalam politik Timur Tengah?”
<http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25121&lan=ba&sp=0> (diakses pada 23 Desember 2016)

Adapun alasan pertama Turki membangun kerjasama bilateral dengan Israel adalah karena ideologi liberal (barat) yang diterapkan pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk pada saat itu, setelah keruntuhan kekhalifahan Ottoman pada tahun 1923.² Alasan yang kedua adalah atas kepentingan masing-masing negara dalam hal perdagangan senjata militer.

Keuntungan yang didapatkan masing-masing negara antara Turki dan Israel menjadikan hubungan bilateral kedua negara semakin baik, sehingga pada tahun 1950 Turki dan Israel kemudian memutuskan untuk membuka perwakilan diplomatik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keseriusan antar kedua negara dalam menjalin kerjasama bilateral, baik dalam ekonomi, politik, militer bahkan perdamaian konflik antara Israel dan Palestina.

Kemudian berlanjut dengan adanya gejolak yang dilakukan oleh masyarakat Turki untuk memberikan rasa simpati mereka kepada Palestina. Ditambah lagi dengan adanya blokade yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza. Adanya blokade-blokade tersebut menyebabkan sulitnya beberapa negara dan beberapa organisasi internasional untuk mengirmikan bantuan melalui jalur Gaza.

Atas serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dan banyaknya warga sipil yang menjadi korban, beberapa negara langsung mengambil tindakan untuk membantu konflik antar kedua negara tersebut. Salah satu bantuan konkret yang telah dilakukan adalah mengirimkan kapal perdamaian Mavi Marmara.

² “Dampak Pertistiwa Mavi Marmara terhadap Hubungan Diplomatik Turki Israel.” <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57673/Ni%20Luh%20Desriana.pdf?sequence=1> (diakses pada 23 Desember 2016)

Mavi Marmara adalah sebuah kapal milik perusahaan pelayaran Turki, *Istanbul Fast Ferries Co. Inc.*, yang bertujuan untuk mengirimkan bantuan berupa 10.000 ton bahan makanan, mainan anak-anak, alat tulis, bahan bangunan, dan lain-lain. Mavi Marmara merupakan salah satu kapal yang tergabung didalam pelayaran “*Freedom Flotilla*”. Pelayaran ini terdiri atas 9 kapal, yaitu kapal penumpang Mavi Marmara, kapal penumpang Sfendoni, kapal penumpang Challenger dan 6 kapal barang yang mengangkut logistik. Kapal Mavi Marmara adalah salah satu kapal yang cukup besar diantara beberapa kapal tersebut.

Dalam pelayaran tersebut ada sekitar 700 relawan kemanusiaan, aktivis, dan jurnalis dari beberapa negara di dunia, dan juga terdapat organisasi kemanusiaan Turki, IHH (*Humanitarian Relief Foundation*) sebagai pihak yang mengkoordinasi dari pelayaran ini dalam misi kemanusiaan di Palestina.³ Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayaran ini banyak didominasi bantuan oleh warga sipil dan organisasi Turki.

Tepatnya pada tanggal 30 Mei 2010, Mavi Marmara mulai berlayar dari Kota Antalya, kota bagian selatan Turki dengan tujuan akhir yaitu pelabuhan Gaza, Palestina. Setelah beberapa jam melakukan pelayaran, pada tanggal 31 Mei 2010 dini hari, Mavi Marmara langsung diserang dan dikepung oleh angkatan laut Israel. Semua aktivis yang berada didalam kapal berusaha untuk melindungi diri dan berupaya melawan dengan cara seadanya.

³ “Catatan 5 Tahun Tragedi Mavi Marmara, Taruhan Nyawa”
<https://www.arrahmah.com/news/2015/06/01/catatan-5-tahun-tragedi-mavimarmara-taruhan-nyawa.html> (diakses pada 8 November 2016)

Serangan demi serangan diarahkan ke arah badan kapal bahkan juga kepada para aktivis yang berada didalamnya. Peluru tajam tidak pandang bulu untuk dikeluarkan, bahkan aktivis diinterogasi dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Militer Israel secara brutal menyerang siapa saja yang mencoba melawan, hingga menyebabkan banyaknya korban yang terluka dan meninggal dunia.

Kemudian pada akhirnya Mavi Marmara jatuh ke tangan angkatan militer Israel, dan menelan banyak korban jiwa. Sebanyak 10 relawan kemanusiaan asal Turki tewas, dan 60 relawan lainnya mengalami luka-luka.⁴ Pelayaran *Freedom Flotilla* ini sebenarnya dapat dikatakan pelayaran “nekat” karena berusaha untuk menembus jalur blokade oleh Israel di perairan Palestina (Gaza). Karena sudah ada beberapa kali bantuan yang dikirim melalui banyak jalur, tetap saja dihalau oleh militer Israel untuk kembali ke asal pengiriman atau diarahkan menuju ke pelabuhan Israel. Hal ini yang menyebabkan kenekatan tersebut terjadi.

Atas dasar serangan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap kapal Mavi Marmara, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) langsung melakukan investigasi terhadap penyerangan tersebut. Sebelum laporan investigasi diumumkan, laporan tersebut lebih dahulu diketahui oleh masyarakat umum (bocor). Laporan berisikan bahwa, serangan yang dilakukan oleh militer Israel sangat berlebihan dan terindikasi melakukan tindakan kekerasan, sehingga menewaskan sepuluh aktivis Turki dan korban luka-luka lainnya.

⁴ Ibid

Berdasarkan laporan tersebut, pada tanggal 2 September 2011 Turki mengambil tindakan tegas untuk mengusir dan menyatakan *persona non grata* terhadap Duta Besar Israel beserta seluruh diplomat seniornya.⁵

Adapun tanggapan Israel dari tindakan dan tuntutan yang diberikan Turki adalah, kearogansian dengan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan militer Israel terhadap kapal Mavi Marmara merupakan bentuk dari perlawanan karena kapal Mavi Marmara yang dianggap telah melewati batas teritorial Israel. Kemudian ketakutan adanya pengiriman bantuan senjata perang melalui pelayaran tersebut yang akan diberikan kepada sipil Palestina, juga merupakan salah satu alasan serangan dilakukan. Oleh sebab itu, Israel enggan untuk mengganti rugi, bahkan tidak mau untuk meminta maaf kepada keluarga korban ataupun kepada Pemerintah Turki.

Namun demikian, setelah enam tahun berhentinya hubungan diplomatik Turki dengan Israel, pada tanggal 27 Juni 2016 kemarin, kedua negara tersebut mengumumkan untuk melakukan pemulihan hubungan diplomatik. Pemulihan ini sebenarnya secara diam-diam telah dilakukan antar kedua negara dari tahun 2013 dalam sektor perdagangan dan pariwisata. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan kedua negara akan segera menempatkan duta besar di masing-masing negara.⁶

⁵ “Turki Mengusir Dubes Israel”
<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2011-09-03/turki-mengusir-dubes-israel/93112>
(diakses pada 2 Desember 2016)

⁶ “Israel-Turki Resmi Normalisasi Hubungan”
<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160628081733-120-141430/israel-turki-resmi-normalisasi-hubungan/> (diakses pada 7 Desember 2016)

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam konferensi pers di Ankara pada tanggal 16 November 2016 kemarin menyatakan telah menunjuk Kemal Okem sebagai perwakilan diplomatik senior untuk mengisi jabatan duta besar di Israel. Sebaliknya, Israel juga telah menunjuk Eith Naeh sebagai perwakilan diplomatik untuk Turki.⁷

Ini menjadikan sebuah pertanyaan besar dan menarik untuk dikaji, mengapa dengan mudahnya Turki melakukan pemulihan hubungan diplomatik, sejak adanya tuntutan yang dikeluarkan terhadap Israel dan serta mengusir duta besar Israel. Dapat dimengerti secara logika bahwa pasti ada kepentingan nasional dan politik luar negeri Turki, sehingga mengambil kebijakan yang sangat mengejutkan tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Dalam fenomena hubungan internasional, pasang surut hubungan diplomatik merupakan hal yang sudah tidak cukup asing lagi. Akan tetapi, yang perlu dipahami dalam melakukan hubungan diplomatik adalah kebijakan yang diambil oleh negara dalam menghadapi suatu permasalahan, dan dalam memenuhi kepentingan nasional sebelum memulai hubungan diplomatik.

⁷“Rujuk, Turki Tunjuk Dubes Baru untuk Israel”
<http://international.sindoneews.com/read/1155893/43/rujuk-turki-tunjuk-dubes-baru-untuk-israel-1479295836> (diakses pada 7 Desember 2016)

Oleh sebab itu, penulis dalam hal ini akan berusaha menjelaskan dan mengkaji bagaimana suatu negara memainkan perannya dalam praktik diplomasi, baik dari sisi kepentingan nasional, ataupun politik luar negerinya. Melalui skripsi ini penulis juga secara general dan spesifik akan mempelajari latar belakang kedua negara yang sedang diteliti, Turki dan Israel, serta praktik diplomasi yang dilakukan. Sehingga hal ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian ilmu hubungan internasional.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat membuat suatu rumusan masalah yaitu:

Mengapa Turki melakukan pemulihan hubungan diplomatik kembali dengan Israel pada tahun 2016?

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pilihan Rasional

Didalam percaturan hubungan internasional, ada beberapa cara negara dalam memenuhi kepentingan nasional yang ingin dicapai. Baik itu dari segi politik luar negeri, militer, ekonomi, keamanan dan lain sebagainya. Hal tersebut kemudian membuat para pengambil keputusan harus berhati-hati, dalam membuat segala rumusan keputusan. Merumuskan politik luar negeri merupakan satu hal yang paling penting didalam mencapai kepentingan suatu negara.

Teori Pilihan Rasional oleh Graham T. Allison dapat menjelaskan bagaimana alasan-alasan dalam pengambilan keputusan luar negeri. Menurut Graham T. Allison, pilihan rasional dapat dijelaskan sebagai pilihan yang konsisten dan memaksimalkan kepada nilai (*value-maximizing*), dalam batasan yang telah ditentukan. Sehingga pengambil keputusan harus memutuskan secara rasional dalam memilih alternatif-alternatif kebijakan. Alternatif yang diajukan dalam pengambilan kebijakan sangat beragam dan juga dengan mempertimbangkan konsekuensi positif maupun negatif (untung dan rugi) yang akan ditimbulkan. Oleh sebab itu, kebijakan yang dikeluarkan sebagai pilihan rasional memiliki beberapa komponen didalamnya, diantaranya adalah tujuan dan sasaran, alternatif, konsekuensi (akibat) dan juga pilihan.

Graham T. Allison mengajukan tiga model untuk menjelaskan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ada tiga model yang diajukan oleh Graham T. Allison dalam teori ini yaitu model aktor rasional, model proses organisasi, dan model politik birokratik.

Model Aktor Rasional

Allison memperkenalkan aktor rasional sebagai analisis dasar dari teori pilihan rasional. Maksud dari analisis dasar tersebut adalah menjelaskan tindakan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan keputusan, dimana kejadian dalam urusan luar negeri dipahami sebagai tindakan yang dipilih oleh negara atau pemerintah. Kemudian pemerintah memilih tindakan yang akan memaksimalkan sasaran dan yang strategis.

Pengorganisasian aktor rasional dibagi menjadi tiga faktor yaitu aktor nasional bersatu dimana bangsa atau pemerintahan dipahami sebagai pengambil keputusan yang rasional dan kesatuan. Adanya permasalahan yang timbul dimana tindakan yang akan dipilih sebagai respons terhadap situasi strategis yang dihadapi aktor.

Ancaman dan peluang yang timbul di pasar internasional membuat negara bertindak; dan tindakan sebagai pilihan yang dilakukan oleh negara atau perwakilan. Hal ini dipilih sebagai alat yang akan memaksimalkan nilai untuk mencapai tujuan negara. Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif/opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional / intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang dan tepat.⁸

Model Proses Organisasi

Model ini lebih menekankan kepada proses pengambilan keputusan, dan menjadikannya sebagai suatu proses mekanistik yang melewati tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku (*standard operating procedure*) yang telah berlaku selama ini. Keputusan yang ditetapkan dipandang sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi.

⁸ Allison, Graham T, *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*, Boston: Little, Brown and Company. 1971.

Lebih lanjut Allison kemudian membahas tentang perilaku pemerintah, dan menjelaskan bahwa perilaku pemerintah merupakan tindakan yang dipilih oleh pembuat keputusan yang bersifat rasional. Tidak hanya perilaku pemerintah yang membutuhkan koordinasi, perilaku individu dari pembuat keputusan harus dikoordinasikan. Koordinasi tersebut kemudian membutuhkan standar kerja baku agar sesuai dengan hal yang ingin dicapai dari pembuat keputusan. Pemerintah disini tidak hanya pemimpin atau memainkan politik saja. Sebuah pemerintahan terdiri dari organisasi, yang masing-masing dengan seperangkat standar baku dan program yang tetap.

Model Politik Birokratik

Dalam model ini Allison menekankan kepada suatu proses pengambilan keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang berkepentingan melalui proses tarik menarik, tawar menawar, saling mempengaruhi dan kompromi antar stake holders terkait. Keputusan yang ditetapkan merupakan proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan rumit.

Untuk dapat menjelaskan bagaimana proses Turki melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel, penulis menggunakan model yang pertama yaitu Model Aktor Rasional. Adapun alasan penulis memilih model aktor rasional karena dapat menjelaskan alasan *decision maker* Turki dalam memulihkan hubungan diplomatiknya dengan Israel.

Setiap negara dapat digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang paling utama dari teori ini adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam model aktor rasional ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan akan membuat alternatif-alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan dan sasaran utama dari pilihan rasional adalah kedaulatan (kemanan) dan juga kepentingan nasional. Suatu pilihan atau kebijakan rasional merupakan *value-maximizing*. Jadi, aktor rasional, yang dalam hal ini pengambil keputusan, memilih alternatif dengan hasil tertinggi untuk kemudian dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam keputusan kebijakannya.⁹

Sebagai komponen dalam pembuatan kebijakan luar negeri, Graham T. Allison menyatakan:

“National security and national interest are the principal categories in which strategic goals are conceived. National seeks security and range of other objectives.”

Dalam setiap proses pembuatan kebijakan luar negeri (*decision making process*) memang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemudian, proses pembuatan kebijakan luar negeri juga melibatkan banyak aktor domestik yang berasal dari berbagai institusi.

⁹ Ibid

Hal ini menyebabkan dari tiap aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga terjadi proses tarik-ulur kepentingan. Namun, kebijakan luar negeri yang dihasilkan tetap merupakan satu kebijakan yang dianggap dapat memenuhi kepentingan nasional secara maksimal berdasarkan pertimbangan dan konsekuensi yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini Allison juga menyatakan bahwa:

“Governments select the action that will maximize strategic goals and objectives.”

Menurut Allison, *goals and objectives* dalam pembuatan kebijakan luar negeri merupakan tujuan dari kebijakan yang dibuat. Dengan demikian, kebijakan luar negeri yang akan diambil merupakan kebijakan yang dinilai dapat digunakan secara maksimal. Model aktor rasional juga diperkuat oleh ilmuwan hubungan internasional Mochtar Mas' oed:

“Politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.”¹⁰

¹⁰ Mochtar Mas' oed, “Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi”, LP3S, Jakarta, 1990, hlm. 234.

Setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang paling mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan alternatif-alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Dalam membuat keputusan pemulihan hubungan diplomatik kembali dengan Israel, Turki harus membuat suatu keputusan dan juga mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Adapun keuntungan dan kerugian tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1.1

Tabel Untung Rugi Pemulihan Hubungan Diplomatik Turki dengan Israel

Opsi	Keuntungan	Kerugian
Melakukan Pemulihan Hubungan Diplomatik dengan Israel	<ul style="list-style-type: none"> - Turki dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan militernya kembali - Turki dapat mendesak Israel untuk melakukan ganti rugi terhadap korban Mavi Marmara 	<ul style="list-style-type: none"> - Timbulnya kecemasan dari beberapa negara sahabat Turki, terutama negara-negara Arab

Opsi	Keuntungan	Kerugian
Tidak Melakukan Pemulihan Hubungan Diplomatik dengan Israel	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan Turki dengan negara-negara sahabat yang menentang invasi Israel tetap stabil 	<ul style="list-style-type: none"> - Turki kehilangan legitimasi di kawasan Timur Tengah - Turki akan terus didesak Amerika Serikat

Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa pertimbangan dalam hal masalah, adanya pertimbangan tujuan yang akan dicapai, keuntungan dan kerugian yang didapat, sangat mempengaruhi pengambil keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Oleh sebab itu pengambilan keputusan politik luar negeri tidak semata-mata hanya memetingkan kepentingan pribadinya saja, tetapi juga pertimbangan keuntungan-kerugian dari keputusan yang akan diambil.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Didalam dunia hubungan internasional, kepentingan nasional merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena setiap tindakan yang diambil oleh suatu negara, sangat berkaitan dengan kepentingan nasional yang akan dipenuhi.

Menurut H. J. Morgenthau, suatu negara sangat penting dalam mencari kekuasaan, yaitu dengan apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lainnya. Kekuasaan tidak akan terjadi tanpa kekuatan nasional. Politik suatu negara tidak lepas dari suatu kepentingan nasional, karena tujuan politik adalah untuk mempertahankan kepentingan nasional.¹¹

Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional (*national interest*) adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan, yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.

¹¹ H.J Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Buku Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 91.

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan suatu unsur yang menjadi kebutuhan sangat penting bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.¹² Dari unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional ada karena suatu negara hanya dapat bergantung pada sumber daya alam yang tersedia untuk meyakinkan negara lain dalam lingkup, dimana setiap negara terdapat kepentingan masing-masing. Konsep kepentingan nasional merupakan suatu tujuan dari negara yang dicapai melalui kerjasama yang baik dan harmonis dengan negara lain.

Sebagaimana menurut Morgenthau, Jack C. Plano dan Roy Olton, dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional adalah hal yang umum dilakukan oleh negara-negara di dunia. Adanya suatu keputusan, tindakan, kebijakan memiliki arti kepentingan yang nantinya akan memberikan dampak baik bagi negara tersebut. Karena sangat tidak mungkin suatu negara tidak memiliki kepentingan nasional.

Dapat diketahui bahwa ada suatu kepentingan nasional Turki dalam melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Turki ingin memenuhi alat-alat pertahanan dan ekonomi mereka kembali dengan Israel. Adanya bantuan dan *feed back* dari Israel atas bantuan alat-alat pertahanan dan kerjasama militer dan ekonomi, membuat Turki melakukan pemulihan hubungan diplomatik.

¹² Jack C. Plano, Roy olton, *The International Relations Dictionary*, terj. Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd., England, 1982, Hal 7.

Kemudian dengan adanya dorongan Amerika Serikat sebagai negara sekutu Israel, menyebabkan Turki untuk langsung membuat keputusan pemulihan hubungan diplomatik tersebut. Dapat dimengerti bahwa dalam hal ini Israel sebagai negara perantara kerjasama antara Amerika Serikat dengan Turki.

Sebelumnya Turki juga telah membuat sebuah pengajuan kompensasi terhadap Israel. Turki mendesak untuk Israel segera meminta maaf kepada korban penyerangan Kapal Mavi Marmara dan membayar ganti rugi. Karena penyerangan kapal Mavi Marmara merupakan suatu tindakan yang mencederai hubungan baik kedua negara tersebut.

Kemudian adanya kepentingan kemanusiaan atas konflik Israel dan Palestina. Sejak adanya blokade bantuan yang dilakukan oleh Israel terhadap korban perang di Palestina, menyebabkan Turki dan beberapa negara lainnya sulit untuk mengirimkan bantuan, terutama di jalur Gaza. Dengan melakukan pemulihan hubungan diplomatik, Turki dapat dengan mudah melakukan persuasif terhadap Israel dalam mengirmkan bantuan di Palestina. Dari beberapa hal tersebut dapat diketahui apa saja kepentingan nasional Turki dalam melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel.

E. Hipotesa

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik hipotesa bahwa Turki melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel karena:

- Parlemen Turki menyepakati adanya normalisasi hubungan ndiplomatik dengan Israel karena terdapat kepentingan Turki terhadap Israel dalam hal penguatan ekonomi dan militer Turki.
- Israel menyepakati adanya kompensasi yang diajukan oleh Turki, dan adanya dorongan dari Amerika Serikat.

F. Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang diambil, pembahasan akan diambil dari rentan tahun 2010-2016, dimana pada rentan waktu ini terjadinya konflik dan pemutusan hubungan diplomatik antara Turki dan Israel, sampai kepada pemulihan hubungan diplomatik kembali.

G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Tipe Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti menjelaskan alasan-alasan mengenai pemulihan kembali hubungan diplomatik Turki dengan Israel

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dokumen, dan bahan yang diambil dari internet. Data tentang Turki, Israel, dan kebijakan luar negeri pada penelitian ini diambil dari beberapa buku, jurnal, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan telaah pustaka (*library research*). Adapun data dan informasi diambil dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Kemudian juga mengunjungi beberapa situs di internet dalam melengkapi data penulis.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Sifat data penelitian ini adalah informasi kualitatif. Metode kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan adanya kata-kata tertulis ataupun yang terucap dari para pelaku yang diamati.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang direncanakan dalam skripsi ini adalah:

BAB I, adalah bab pendahuluan yang berisi tentang aturan-aturan dalam penulisan ilmiah. Berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, dan, sistematika penulisan.

BAB II, adalah bab yang memaparkan hubungan diplomatik Turki dengan Israel

BAB III, merupakan bab yang memaparkan upaya-upaya Turki dalam perbaikan hubungan diplomatik dengan Israel

BAB IV, merupakan bab yang menjelaskan alasan domestik dan internasional Turki dibalik pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel

BAB V, adalah bab penutup berisi tentang kesimpulan yang diambil dari keseluruhan penjelasan atau dekripsi fakta-fakta ataupun saran.